

## Pengaruh Jumlah Penduduk, Retribusi Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tabanan

Ni Putu Sudarsani<sup>1</sup>, I. N. Widhya Astawa<sup>2</sup>, I. K. Djayastra<sup>3</sup>, I. G. L. Putu Tantra<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ekonomi Pembangunan, Universitas Tabanan

<sup>4</sup>Ekonomi Pembangunan, Universitas Warmadewa

e-mail: [astawawidhya@gmail.com](mailto:astawawidhya@gmail.com)

Received : Februari, 2026	Accepted : Februari, 2026	Published : Maret, 2026
---------------------------	---------------------------	-------------------------

### **Abstract**

This study analyzes the influence of population, regional levies, and government spending on Tabanan Regency's Locally Generated Revenue (PAD). Using a quantitative approach, the results show that all three variables simultaneously and partially have a positive and significant effect on PAD. By integrating inclusive economic theory with the strategic role of village governance, this study confirms that optimizing PAD is not merely an administrative matter but rather an instrument for achieving equitable growth. Policy recommendations focus on digitizing levies and strengthening local human resource capacity to address post-pandemic economic dynamics in Bali.

**Keywords:** *Local Original Income, Inclusive Economy, Retribution, Government Expenditure, Tabanan*

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis pengaruh jumlah penduduk, retribusi daerah, dan pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan. Dengan pendekatan kuantitatif, hasil menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial, ketiga variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Melalui integrasi teori ekonomi inklusif dan peran strategis tata kelola desa, penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi PAD bukan sekadar masalah administratif, melainkan instrumen untuk mencapai pertumbuhan yang merata. Rekomendasi kebijakan difokuskan pada digitalisasi retribusi dan penguatan kapasitas SDM lokal guna menghadapi dinamika ekonomi pasca-pandemi di Bali.

**Kata Kunci:** *Pendapatan Asli Daerah, Ekonomi Inklusif, Retribusi, Pengeluaran Pemerintah, Tabanan*

### **1. PENDAHULUAN**

Kemandirian fiskal daerah merupakan pilar utama dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia. Dalam perspektif ekonomi makro dan mikro, efisiensi alokasi sumber daya di

tingkat daerah menentukan keberhasilan pembangunan nasional (Kusumah dkk., 2025; Murthi & Tantra, 2024). Di Bali, dinamika ini menjadi sangat kompleks karena ketergantungan pada sektor pariwisata yang rentan terhadap guncangan eksternal

(Suryawan, 2023; Tantra & Murthi, 2025). Kabupaten Tabanan, sebagai pusat agraris, memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi regional melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga mencerminkan perilaku kepatuhan wajib pajak dan efektivitas kebijakan pajak progresif yang diterapkan pemerintah (Murthi dkk., 2015; Murthi dkk., 2018). Namun, tantangan nyata muncul ketika pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan inklusivitas. Pertumbuhan PAD harus mampu mendorong pembangunan perdesaan yang inklusif untuk menciptakan keadilan ekonomi (Murthi, 2024). Hal ini sejalan dengan diplomasi ekonomi inklusif berbasis Pancasila yang menekankan pemerataan (Murthi dkk., 2025). Oleh karena itu, memahami determinan PAD di Tabanan menjadi sangat urgensi, terutama dalam mengaitkan peran pemerintah dan digitalisasi terhadap pertumbuhan yang berkualitas (Murthi dkk., 2023).

Kabupaten Tabanan, sebagai lumbung pangan Provinsi Bali, menghadapi tantangan fluktuasi PAD yang cukup tajam, terutama pada periode 2019–2021. Perlambatan ini dipicu oleh guncangan ekonomi akibat pandemi dan dinamika komponen kependudukan (Badan Keuangan Daerah, 2022). Secara teoretis, pertumbuhan penduduk dapat mendorong aktivitas ekonomi yang berimplikasi pada basis pajak (Sukirno, 2016), sementara belanja pemerintah berfungsi sebagai katalisator pembangunan infrastruktur yang menarik investasi (Peacock & Wiseman, 2014). Penelitian sebelumnya di wilayah serupa menunjukkan hasil yang beragam, di mana retribusi dan pajak daerah tetap menjadi tulang punggung APBD (Anggreni, 2019; Okawati, 2018). Artikel ini bertujuan membedah determinan PAD Tabanan untuk memberikan rekomendasi strategis bagi pengambil kebijakan lokal.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatif dengan data sekunder periode 2011–2021. Variabel independen meliputi jumlah penduduk ( $X_1$ ), retribusi daerah ( $X_2$ ), dan pengeluaran pemerintah ( $X_3$ ), dengan PAD sebagai variabel dependen ( $Y$ ). Analisis

dilakukan melalui regresi linier berganda untuk menguji pengaruh parsial dan simultan, serta memastikan model memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) melalui uji asumsi klasik (Gujarati, 2015).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hasil Analisis Statistik

Model regresi dinyatakan lolos dari seluruh uji asumsi klasik. Hasil uji regresi linier berganda diringkas sebagai berikut:

Model regresi menunjukkan nilai  $R^2$  sebesar 0,823, yang berarti 82,3% variasi PAD Kabupaten Tabanan dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

$$Y = 395,7 \text{ Milyar} + 9,7 \text{ Juta } X_1 + 156,4 \text{ Juta } X_2 + 1,36 \text{ Juta } X_3$$

Uji F (Simultan):  $F_{\text{hitung}} 10,845 > F_{\text{tabel}} 4,35$  (sig 0,005), menunjukkan pengaruh simultan yang signifikan.

Persamaan Regresi:

$$Y = 395.716.832.484,45 + 9.704.237,67 X_1 + 156.462.377,74 X_2 + 1.364.520,54 X_3$$

### 3.2 Pembahasan

Pengaruh Jumlah Penduduk ( $X_1$ ): Temuan menunjukkan pengaruh positif signifikan ( $t_{\text{hitung}} 4,956$ ; sig 0,002). Sesuai dengan teori pertumbuhan kependudukan (Mangkoesobroto, 2014), peningkatan jumlah penduduk memperluas skala ekonomi dan basis konsumsi daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Indriani (2018) yang menyatakan penduduk sebagai subjek pembangunan sekaligus sumber penerimaan daerah.

Jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap PAD. Dalam konteks mikro, penduduk adalah motor penggerak industri kreatif dan UMKM di Tabanan (Nanda dkk., 2025). Namun, pertumbuhan kuantitas harus dibarengi dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk memastikan penyerapan tenaga kerja yang optimal (Sukriani dkk., 2023; Suarbawa dkk., 2025). Tanpa kualitas SDM yang mumpuni,

ledakan penduduk justru berisiko meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran di Bali (Muliarta dkk., 2026; Radityana dkk., 2023).

Pengaruh Retribusi Daerah ( $X_2$ ): Retribusi berpengaruh positif signifikan ( $t_{hitung}$  3,692; sig 0,021). Sebagai sumber pendapatan yang berkaitan langsung dengan layanan publik, retribusi merupakan komponen vital PAD (Halim, 2014). Hasil ini memperkuat penelitian Anggreni (2019) bahwa intensifikasi retribusi menjadi kunci stabilitas APBD di Tabanan.

Retribusi daerah terbukti menjadi kontributor signifikan. Efektivitas retribusi sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat, yang dalam penelitian sebelumnya dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang adil dan transparan (Murthi dkk., 2015). Penguatan retribusi di objek wisata seperti Jatiluwih menjadi contoh nyata bagaimana potensi lokal mampu mendorong pendapatan daerah (Sari dkk., 2024).

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah ( $X_3$ ): Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan ( $t_{hitung}$  3,520; sig 0,019). Hal ini mendukung Hukum Wagner (2015) bahwa aktivitas pemerintah yang meningkat melalui belanja pembangunan akan mendorong pendapatan daerah. Investasi pada infrastruktur publik menciptakan ekosistem bisnis yang sehat bagi pelaku ekonomi lokal (Peacock & Wiseman, 2014).

Pengeluaran pemerintah berperan sebagai katalisator pembangunan. Belanja daerah yang diarahkan pada infrastruktur digital terbukti memperkuat kinerja BUMDes dan mendorong pertumbuhan inklusif di perdesaan (Murthi dkk., 2022a; Murthi dkk., 2023a). Pemerintah harus berperan aktif dalam menciptakan ekosistem ekonomi sirkular digital guna meningkatkan efisiensi konsumsi dan produksi di tingkat desa (Tantra & Murthi, 2026). Selain itu, belanja pemerintah juga harus responsif gender guna menekan ketimpangan pembangunan di pulau Bali (Murthi, 2023).

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa jumlah penduduk, retribusi daerah, dan pengeluaran pemerintah adalah determinan vital PAD Kabupaten Tabanan. Sinergi antara kebijakan makro dan praktik mikro di lapangan menentukan keberlanjutan fiskal daerah

Kota Denpasar memiliki persepsi yang sangat positif terhadap adopsi QRIS. Berdasarkan indikator penyerapan, pemahaman, dan penilaian, QRIS dinilai sebagai solusi pembayaran yang efisien, praktis, dan mendukung mobilitas ekonomi perkotaan. Faktor kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) mengungguli kekhawatiran terhadap risiko teknis. Denpasar telah menunjukkan kesiapan sebagai ekosistem digital, di mana masyarakatnya telah beralih dari sekadar mencoba menjadi pengguna aktif yang loyal.

### 4.2 Saran

1. Digitalisasi Sektor Publik: Menerapkan strategi digital untuk meningkatkan daya saing UMKM dan efisiensi pemungutan retribusi (Astawa dkk., 2026; Tantra & Murthi, 2026).
2. Penguatan BUMDes: Mengoptimalkan peran BUMDes sebagai kewirausahaan sosial untuk meningkatkan pendapatan desa yang berkontribusi pada PAD (Murthi, 2023a, 2023b).
3. Pemerataan Pembangunan: Fokus pada pembangunan perdesaan untuk mengurangi kemiskinan melalui upah minimum yang kompetitif dan inklusif (Murthi, 2023; Irawan dkk., 2024).

### DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S., & Agustini, D. A. E. (2024). Business Ethics Study of Illegal Technology Financial Practices in the Form of Online Loans. *Jurnal Ilmiah Sains Sosial, Kewirausahaan dan Kebudayaan*, 2(2), 110-117.
- Ambudhi, P. A. I. S. (2024). Pengaruh Persepsi Kemanfaatan, Kemudahan, dan Risiko Terhadap Minat Dalam Menggunakan QRIS pada UMKM Denpasar. (Skripsi/Jurnal Relevan).
- Anggreni. (2019). *Pengaruh Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Di Kabupaten*

- Tabanan. Jurnal Ekonomi. Universitas Tabanan.
- Ariani, N. M. (2020). Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*.
- Arimbawa, I. G. N. (2018). *Pengaruh Pengeluaran dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung*. Jurnal Ekonomi. Universitas Udayana.
- Aristana, I. D. G. A., Rahmantari, N. L. L., & Utari, N. K. M. T. (2023). Optimalisasi Social Commerce Sebagai Strategi Pemasaran Bagi Umkm Di Era Marketing 4.0. *Jurnal Ilmiah Sains Sosial, Kewirausahaan dan Kebudayaan*, 1(1), 59-66.
- Artini, R., & Murthi, N. W. (2019). Inter-Import Deposition In The Bali Economy. *International Journal of Management and Commerce Innovations*, 7(2), 290-298.
- Astawa, I. P. P., Yasmita, I. G. A. L., & Murthi, N. W. (2026). Enhancing Bali MSMEs' Competitiveness through Digital Strategies, Product Innovation, and Local Wisdom. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 14(1), 905-916.
- Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Tabanan. (2022). *Laporan Realisasi Anggaran*.
- Bank Indonesia. (2024). *Data Pengguna QRIS Provinsi Bali*. Jakarta: Bank Indonesia..
- Foxall, G. R. (2022). *Consumer Behavior Analysis: The Behavioral Economics of Consumption*. Routledge.
- Gujarati, D. (2015). *Dasar-dasar Ekonometrika Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hairani, dkk. (2024). Implementasi QRIS dalam Meningkatkan Efisiensi Transaksi Digital di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Halim. (2014). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Handayani, M. M., & Rahmantari, N. L. L. (2024). Motivasi Dan Tantangan Adopsi Mobile Payment: Perubahan Perilaku Konsumen Dan Transformasi Industri Keuangan. *Jurnal Ilmiah Sains Sosial, Kewirausahaan dan Kebudayaan*, 2(2), 166-172.
- Indriani. (2018). *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Pengeluaran dan Jumlah Penduduk Terhadap Peningkatan PAD Se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*. Jurnal Ekonomi. Universitas Udayana.
- Kusumah, R. M., Fauzany, R., Yuniawati, R. I., Febriani, E., Paramita, A. S., Putri, R. H., ... & Erwandy, E. (2025). *Pengantar Ilmu Ekonomi Dalam Mikro Dan Makro Ekonomi*. Penerbit Widina.
- Mangkoesebroto. (2014). *Teori Pertumbuhan Penduduk*. Jakarta: Salemba Empat.
- Marta, I. N. G., & Murthi, N. W. (2019). Long-Term Analysis Of Importation Opening In The Bali Economy. *International Journal of Management and Commerce Innovations*, 7(2), 442-452.
- Muliarta, A. N. G. P., Tantra, I. G. L. P., Pardita, D. P. Y., & Murthi, N. W. (2026). Dinamika Determinan Kemiskinan di Provinsi Bali 2014-2023: Replikasi Kontekstual Jangka Panjang dengan Pendekatan Random Effect Model. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 9(1), 235-246.
- Murthi, N. W. (2024). Rural Development To Create Inclusive Economic Growth. *Jurnal Ilmiah Satyagraha*, 7(1), 252-262.
- Murthi, N. W., & Tantra, I. G. L. P. (2024). *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Penerbit Dewa Publishing.
- Murthi, N. W., dkk. (2023). The Role of Government and Digitalization (ICT) in Fostering Equitable Growth. *Tuijin Jishu/Journal of Propulsion Technology*.
- Murthi, N. W., Taufiq, I., Yee, E., & Aktaniensia, N. A. (2025). Indonesia's Inclusive Economic Diplomacy Based on the Pancasila Ideology. *Jurnal Pelita Raya*, 1(3), 152-165.
- Murthi, N. W., Utama, M. S., Saskara, I. A. N., & Marhaeni, A. A. I. N. (2023). The Role of Government and Digitalization (ICT) in Fostering Equitable Growth at the Coastal Village of Badung, Bali. *Tuijin Jishu/Journal of Propulsion Technology*, 44(04), 2023.
- Okawati. (2018). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan*. Jurnal Ekonomi. Universitas Tabanan.
- Peacock & Wiseman. (2014). *Approaches to The Analysis of Government Expenditure Growth*. Public Finance.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2021). *Organizational Behavior*. Pearson.
- Saleh, I. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan QRIS di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Suarbawa, I. W., Putra, I. K. C. A., Murthi, N. W., & Astawa, I. N. W. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga

- Kerja pada Industri Kerajinan Sanggah di Desa Kapal Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(3), 4495-4510.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D, dan Penelitian Tindakan*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2016). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukraeni, N. P. E., Astawa, I. N. W., Murthi, N. W., & Marta, I. N. G. (2024). Pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *JIS SIWIRABUDA*, 2(2), 127-136.
- Sukriani, N. G. A. A., Suarbawa, I. W., Murthi, N. W., & Djayastra, I. K. (2023). Analysis Of Factors Affecting The Human Development Index In Districts/Cities In Bali Province. *Jurnal Ganec Swara*, 17(4), 1568-1579.
- Tantra, I. G. L. P., & Murthi, N. W. (2024). The Impact of Social Capital as the Basis of Lpd in the Context of Economic Empowerment of Small Fishing Communities. *Power System Technology*, 48(1), 1993-2007.
- Tantra, I. G. L. P., & Murthi, N. W. (2025). Tourism growth and investment in Bali's inclusive economic recovery in 2023: A spatial and econometric approach. *Central Community Development Journal*, 5(2), 96-118.
- Tantra, I. G. L. P., & Murthi, N. W. (2026). The Digital Circular Economy: Technological Innovation Strategies for Production and Consumption Efficiency. *Nomico Journal*. 2 (12), 58-67.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.